

KEBIJAKAN SEKOLAH BUDAYA DI SD NEGERI 1 TRIRENGGO BANTUL

CULTURAL SCHOOL POLICY IN PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL 1 TRIRENGGO BANTUL

Rai Asmara Ramadhan
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
raiasmarar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan implementasi kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Trirenggo pada bulan Maret sampai April. Subjek penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) latar belakang kebijakan sekolah budaya karena ingin melestarikan nilai budaya luhur dan kearifan lokal. Proses perumusan kebijakan sekolah budaya didominasi kepala sekolah dengan merumuskan tujuan dan perencanaan lalu disosialisasikan kepada guru, bersama-sama menyusun silabus dan RPP, dijabarkan programnya dan terlihat respon dari siswa; (2) implementasi kebijakan sekolah budaya yaitu adanya rapat, seminar, menunjuk koordinator program, guru paham mengintegrasikan RPP, program pengintegrasian, kegiatan sekolah dan pembiasaan. Faktor pendukung yaitu, guru, wali murid, pihak ketiga, fasilitas, dan kejelasan program. Sedangkan faktor penghambatnya seperti, SDM kurang terlatih, banyaknya kegiatan, ekonomi wali murid, dan lingkungan.

Kata kunci: Kebijakan, Sekolah Budaya, Sekolah Dasar

Abstract

This study aims to describe the background and implementation of cultural school policy in Public Elementary School 1 Trirenggo. The type of this research is qualitative descriptive. The research was conducted in 1 Trirenggo State Elementary School from March to April. The subject of this study is the Principal, teachers, and students. The results showed that: (1) the background of cultural school policy because they want to preserve noble cultural values and local wisdom. The formulation process of cultural school policy dominated by the Principal from formulating goals and planning then socialized to the teachers, together arranged syllabus and lesson plans, spelled out the program, and responses appear from students; (2) the implementation of cultural school policy is briefings, seminars and appoints a program coordinator, the teacher interprets lesson plan, integrative programs, school activities and habituation. Supporting factors such as teachers, parents, third parties support, facilities, and detailed program. While the inhibiting factors such as, human resources, to many activities, economic parents, and the environment.

Keywords: Policy, Culture School, Elementary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah

sebagai lembaga pendidikan harus mampu mengoptimalkan serta mengembangkan potensi siswa melalui kegiatan belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran tidak hanya sekadar *transfer of knowledge*, namun juga perlu *transfer of value*. Sekolah tidak hanya menyalurkan pengetahuan semata, namun

juga melestarikan nilai-nilai budaya atau *nguri-uri kabudayan*.

Pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya masa lalu yang telah menjadi nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai luhur tersebut sudah sepantasnya disesuaikan dengan kehidupan masa kini dan masa akan datang. Tilaar (2002: 49) menegaskan bahwa tanpa proses pendidikan tidak mungkin kebudayaan itu berlangsung dan berkembang bahkan memperoleh dinamikanya. Hal ini berarti bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pengembangan budaya.

Globalisasi telah membawa suatu bangsa dan negara di dunia tidak mengenal batas-batas wilayah sehingga mengancam eksistensi budaya bangsa jika tidak dilestarikan. Sungguh ironi menjadi bangsa yang tidak mempunyai identitas seperti yang disampaikan Tilaar (2002: 88) bahwa bangsa yang tidak mempunyai identitas adalah bangsa yang terpuruk karena tidak mempunyai harga diri dan tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai suatu kelompok.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2011 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya guna menciptakan dan memperkokoh DIY sebagai Kota Pendidikan serta Kota Budaya. Pendidikan berbasis budaya yang dimaksud menurut Perda DIY

nomor 5 tahun 2011 adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Pengembangan pendidikan berbasis budaya mengacu pada sistem pendidikan nasional yang terintegrasi dengan budaya masyarakat lokal. Maka menurut Duke dan Canady (dalam Syafaruddin, 2008: 120) menegaskan bahwa kepala sekolah dapat pula membuat kebijakan sekolah bersama dengan staf, pengawas, dan komite sekolah. Hal ini seperti yang terjadi di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul. Sekolah ini mengambil kebijakan dalam mengembangkan sekolah budaya didukung setelah adanya Perda maupun Pergub pendidikan berbasis budaya disesuaikan dengan kondisi maupun kemampuan sekolah.

Kebijakan sekolah dalam membangun sekolah budaya berawal ketika SD Negeri 1 Trirenggo pada tahun 2004 merupakan sekolah inklusif. Pada awalnya masih terlihat kesenjangan antara siswa normal dengan siswa difabel. Melihat kondisi tersebut, sekolah tergerak untuk menciptakan budaya peduli, yaitu saling mengasahi satu sama lain. Budaya peduli yang diajarkan kepada siswa,

mendorong sekolah untuk lebih luas lagi mengajarkan nilai-nilai luhur lainnya.

Kearifan lokal yang berkembang di sekitar sekolah menjadi tema yang dikembangkan dengan mengintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Seperti yang menggunakan media seperti jajanan tradisional, dolanan dakon, egrang, gobag sodor, engklek hingga media kearifan lokal yang menggunakan daun seperti janur, sudi, hingga cekethong. Selain menggunakan media kearifan lokal yang terintegrasi dalam mata pelajaran, sekolah melakukan pembiasaan dengan berjabat tangan di pagi hari, izin ke kamar mandi menggunakan Basa Krama hingga pada hari Sabtu seluruh warga sekolah wajib menggunakan Bahasa Jawa. Budaya yang diajarkan kepada siswa tidak hanya seni seperti wayang, tari ataupun karawitan, akan tetapi penanaman nilai-nilai luhur yang sangat baik diberikan kepada anak usia SD.

Keterbatasan biaya maupun siswa yang difabel mengurungkan niat sekolah untuk memilih budaya yang berbentuk artefak. Hal ini didasarkan masyarakat sekitar SD Negeri 1 Trirenggo merupakan golongan menengah ke bawah. Akan sangat berat bagi para orang tua atau wali murid jika harus mengeluarkan biaya untuk perlengkapan pentas, membeli alat, maupun menyewa kostum.

Kekeluargaan dan kesantunan yang ditunjukkan oleh para guru juga sudah bagus namun belum dilihat maupun diteladani oleh

siswa. Hal ini terlihat seperti siswa yang tidak terbiasa menggunakan basa Krama untuk berbicara dengan yang lebih tua, padahal lokasi sekolah terdapat di daerah desa yang kental akan unggah-ungguh. Sekolah mencoba memberi teladan dengan pembiasaan kepada siswa. Meskipun hanya mengajarkan nilai-nilai luhur, bukan berarti sekolah tersebut tidak mencerminkan budaya yang biasa orang lihat. Kebijakan sekolah tersebut menjadi ciri khas tersendiri terlebih SD Negeri 1 Trirenggo merupakan sekolah inklusif sehingga menarik perhatian peneliti untuk menggali permasalahan mengenai kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian yang dibahas tentang mengapa SD Negeri 1 Trirenggo mengambil kebijakan sebagai sekolah budaya dan bagaimana implementasi kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang SD Negeri 1 Trirjenggo dalam mengambil kebijakan sekolah budaya dan mendeskripsikan implementasi kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo. Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan sekolah budaya serta memberikan wawasan bagi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian di bidang yang sama.

Kajian pustaka yang dikaji dalam penelitian ini meliputi teori kebijakan pendidikan Rohman (2014: 108) yang mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekolah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kualitas serta mutu pendidikannya sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku.

Duke dan Canady (dalam Syafaruddin, 2008: 119) terhadap sekolah di British ada beberapa fokus kebijakan sekolah, yaitu melibatkan staf dalam pengambilan keputusan, kurikulum, imbalan dan hukuman, keterlibatan orang tua, peluang bagi pelajar dan iklim sekolah. Suatu kebijakan sekolah sangat penting bagi kehidupan siswa dan para guru karena berkaitan dengan pembelajaran dalam rangka peningkatan efektifitas sekolah.

Perumusan kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu komponen dari suatu kebijakan pendidikan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam bukunya Arif Rohman, Kebijakan Pendidikan (2014: 102) mencakup lima hal penting, yaitu: tujuan (*goal*), rencana (*plans*), program (*programme*), keputusan (*decision*) dan dampak (*effects*).

Implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Charles O. Jones dalam Rohman (2014: 135) dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah didasarkan pada Sistem Pendidikan Nasional namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya sesuai dengan Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2011. Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud diantaranya meliputi kejujuran, kerendahan hati, ketertiban/kedisiplinan, kesusilaan, kesabaran, tanggung jawab, percaya diri, pengendalian diri, integritas, kerja keras/keuletan/ketekunan, ketelitian, kesopanan/kesantunan, kerja sama, toleransi, keadilan, kepedulian, dan kepemimpinan

Model pelaksanaan pendidikan nilai luhur budaya di sekolah mengacu pada Peraturan Gubernur DIY nomor 68 tahun 2012, dapat dilakukan melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan budaya satuan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan pemaparan suatu situasi atau peristiwa, gambaran secara apa adanya. Moleong (2016:168) berpendapat bahwa dalam penelitian kualitatif ini peneliti adalah kunci instrumen yaitu sebagai perencana pelaksana, pengumpul data, analis, penafsir data, dan pelapor. Pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan untuk menemukan, menggambarkan, meneliti, serta menjelaskan secara rinci mengenai perumusan serta implementasi kebijakan SD Negeri 1 Trirenggo sebagai sekolah budaya.

Setting dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Trirenggo pada bulan Maret hingga April. Moleong (2016: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Kepala sekolah dijadikan subjek penelitian untuk menggali data mengenai perumusan hingga implementasi kebijakan sekolah budaya. Guru dan siswa menjadi subjek penelitian karena guru lebih memahami mengimplementasikan program sekolah yang disampaikan kepada siswa.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sugiyono (2013: 224) menyebutkan dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru dan siswa SD Negeri 1 Trirenggo untuk mengetahui alasan pengambilan kebijakan, proses perumusan kebijakan dan sejauh mana implementasi kebijakan sekolah budaya di SD tersebut. Observasi ini digunakan untuk mengamati implementasi program di dalam proses pembelajaran, ekstrakurikuler, kegiatan sekolah maupun aktivitas di lingkungan sekolah. Dokumen yang digunakan adalah data statistik sekolah, RPP, rincian kegiatan sekolah budaya, laporan sekolah berbasis budaya, hingga foto-foto.

Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen penelitian, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman studi dokumen. Instrumen penelitian berisi butir-butir indikator yang menjadi acuan dalam melakukan pencarian data.

Aspek yang diamati dalam perumusan kebijakan sekolah budaya meliputi alasan mengambil kebijakan sekolah budaya, visi, misi, sasaran kebijakan sekolah budaya, kontribusi dalam pengambilan kebijakan sekolah budaya, rincian kebijakan sekolah budaya, pelaksana kebijakan sekolah budaya, dan dampak kebijakan sekolah budaya. Sedangkan kisi-kisi dalam implementasi kebijakan sekolah budaya meliputi kecakapan dan keterampilan guru atas penguasaan budaya, kewenangan/keputusan kepala sekolah, fasilitas sarana dan prasarana penunjang sekolah budaya, kesesuaian materi sekolah budaya dengan penerapan di sekolah, komunikasi antar warga sekolah, metode pembelajaran terhadap sekolah budaya, dan iklim budaya sekolah. Pedoman studi dokumen adalah pedoman yang digunakan peneliti dalam bentuk arsip, laporan, foto, atau dokumen dokumen yang berhubungan dengan kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman. Di dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data yang diperoleh observasi di lapangan dicatat melalui catatan lapangan, data wawancara disimpan menggunakan alat rekam suara selama proses

wawancara sehingga data yang didapat dalam bentuk naratif, yaitu uraian data yang diperoleh dari lapangan apa adanya.

Reduksi data merupakan wujud analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak berkaitan dengan pokok persoalan. Proses reduksi berguna untuk memfokuskan pada perumusan dan pelaksanaan program yang berkaitan dengan kebijakan sekolah budaya.

Penelitian ini cara peneliti menyajikan data yaitu dengan mengklasifikasikan terlebih dahulu data yang diperoleh tentang latar belakang pengambilan kebijakan, proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, hingga faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan sekolah budaya dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif.

Setelah melakukan beberapa kali pengambilan data melalui wawancara dan observasi mendalam di lokasi penelitian, maka dapat diambil kesimpulan yang menjadi latar belakang pengambilan kebijakan, tahapan proses yang dilalui dalam perumusan kebijakan, rincian implementasi kebijakan, hingga faktor yang mendukung serta menghambat implementasi kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo.

Keabsahan Data

Setiap penelitian membutuhkan uji keabsahan untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Sugiyono (2013: 270) menjelaskan bahwa uji kredibilitas data atau

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Penelitian ini untuk mengecek kredibilitas data menggunakan triangulasi teknik serta triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber merupakan teknik untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan hasil yang sama. Subjek penelitian pertama adalah kepala sekolah, subjek kedua yaitu guru kelas dan subjek ketiga adalah siswa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan mempunyai kewenangan dalam menciptakan iklim sekolah yang dikehendaki melalui kebijakan sekolah, karena kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan pendidikan. Sekolah budaya merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan globalisasi. Kebijakan sekolah budaya sangat penting dioptimalkan untuk membangun kesadaran akan potensi luhur

yang kita miliki. Pendirian sebuah sekolah budaya ataupun penguatan kurikulum akan budaya di setiap jenjang pendidikan merupakan suatu proses membangun dan mempertahankan budaya yang ada. Hal ini seperti kebijakan sekolah budaya yang terjadi di SD Negeri 1 Trirenggo Bantul. Penelitian yang dilakukan menggali dalam ranah perumusan kebijakan serta implementasi kebijakan sekolah budaya.

Suatu kebijakan sekolah tentu saja dibuat untuk memajukan sekolah sesuai dengan tuntutan keperluan warga sekolah atau masyarakat luas. Sekolah dituntut untuk tidak hanya menyalurkan pengetahuan semata, namun juga melestarikan nilai-nilai budaya atau *nguri-uri kabudayan*. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trirenggo berusaha melestarikan budaya luhur yang diwariskan nenek moyang kita. Hal ini dikarenakan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai luhur mulai meredup. Hal itu juga dijelaskan Tilaar (2002: 200) yang menyatakan pendidikan bukan hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan intelektual semata, namun keseluruhan nilai budaya. Ini artinya bahwa pendidikan mempunyai tugas penting dalam memberikan pengetahuan serta wawasan kepada siswa serta menjaga agar budaya itu tetap lestari.

Lingkungan yang ada di sekitar SD Negeri 1 Trirenggo merupakan lingkungan budaya yang bernafaskan Jawa. Banyak masyarakat yang masih hidup dan berkembang dengan kearifan lokalnya.

Kepala Sekolah dan guru-guru di SD Negeri 1 Tlirenggo menyadari akan hal itu, bahwa sekolah perlu membawa kearifan lokalnya untuk diajarkan di sekolah. Hal ini sebagai langkah pentingnya melestarikan budaya luhur yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Adanya pengaruh lingkungan itu, semakin mempertegas salah satu faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2010: 52-53) karena adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

Awal kedatangan kepala sekolah pada 2013 akhir, beliau mencoba memasukkan budaya kearifan lokal seperti membuat sudi, cekethong, janur, egrang, dakon, dan laku dodok ke dalam pembelajaran di dalam sekolah. Karena adanya karawitan, beliau mencoba mengangkat guru ekstra tari karena peminatan siswa cukup tinggi, selain adanya ekstra tari. Kemudian kegiatan itu dilaporkan dan diajukan ke Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2014, SD Negeri 1 Tlirenggo lolos tingkat provinsi sebagai sekolah model pendidikan berbasis budaya oleh Dispora DIY. Tahun 2015 *launching* sekolah berbasis budaya oleh Bupati Bantul.

Pengambilan kebijakan sekolah berbasis budaya di SD Negeri 1 Tlirenggo masih didominasi oleh gagasan Kepala Sekolah. kedatangan belaiiau pada awalnya tidak begitu direspon baik oleh guru lainnya.

Pandangan visioner kepala sekolah tidak dibarengi inisiatif oleh guru lain. Hal ini menjelaskan faktor yang memengaruhi pembuatan kebijakan menurut Suharno (2010: 52-53) yaitu adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, artinya berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

Hal tersebut juga menjelaskan teori pendekatan *man-power approach* oleh Rohman (2014: 114-118). Pendekatan man-power ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, apakah masyarakat menuntut untuk dibuatkan suatu kebijakan pendidikan tertentu atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan. *Man-power approach* kurang menghargai proses demokratis dalam perumusan kebijakan pendidikan, terbukti perumusan kebijakannya tidak diawali dari adanya aspirasi dan tuntutan masyarakat, akan tetapi langsung saja dirumuskan sesuai dengan tuntutan masa depan sebagaimana dilihat oleh sang pemimpin visioner.

Proses perumusan menggunakan teori Charles O. Jones dalam bukunya Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan* (2014: 102) mencakup lima hal penting, yaitu: tujuan (*goal*), rencana (*plans*), program

(*programme*), keputusan (*decision*) dan dampak (*effects*).

a. Tujuan

Suatu kebijakan yang hendak ditetapkan harus memiliki tujuan (*goal*) yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan oleh adanya masalah yang terjadi maupun tuntutan zaman yang semakin pesat sehingga mendorong seseorang maupun suatu kelompok mengatasi masalah pendidikan. Nantinya tujuan menjadi visi yang dipegang teguh dalam melakukan segala hal.

SD Negeri 1 Trirenggo dalam mengambil kebijakan Sekolah Berbasis Budaya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur diantaranya membangun kesadaran kebersamaan, budaya peduli dan penguatan nilai luhur. Hal ini bermaksud guna memberikan hak yang sama kepada seluruh anak, baik yang normal maupun inklusif. SD Negeri 1 Trirenggo berusaha memberikan perlakuan yang sama terhadap semua anak didiknya. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk diajarkan nilai budaya luhur. Untuk itu Suryadi dan Tilaar (1993:190) menjelaskan pendidikan memiliki tiga fungsi dalam menjaga kesinambungan kebudayaan dan sebagai agen pengembangan kebudayaan.

b. Rencana

Tujuan yang diinginkan harus direncanakan (*plans*) secara spesifik dan operasional guna mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana disusun supaya

pelaksanannya lebih terarah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kepala sekolah SD Negeri 1 Trirenggo melakukan inisiatif dalam merumuskan perencanaan. Kemudian beliau jabarkan melalui sosialisasi kepada guru di rumah makan Parangtritis. Pada awalnya guru kurang merespon baik niat kepala sekolah. Akan tetapi karena dirasa perencanaannya itu menarik, guru mengikuti arahan dari kepala sekolah. kaitannya dengan program kegiatan di luar sekolah, dirumuskan siapa yang menjadi koordinator dalam melaksanakan program. Sedangkan kaitannya dalam pembelajaran di kelas, silabus disusun bersama-sama dengan mengintegrasikan unsur budaya ke dalamnya. Kemudian guru menyusun RPP yang nantinya akan diajarkan kepada siswa.

Perencanaan sebaiknya disusun mencakup seluruh unsur pendidikan yang ada, mulai dari sumber daya manusia, materi, sarana prasarana dan hasil yang ingin dikehendaki. Semuanya disusun dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam lingkup pendidikan. Begitu juga menjawab pandangan Kneller (Manan, 1989: 45) bahwasanya pendidikan merupakan proses yang digunakan suatu masyarakat untuk mengendalikan dan membentuk individu sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditentukan oleh nilai-nilai dasar suatu kebudayaan.

c. Program

Program yang terdapat SD Negeri 1 Trirenggo telah mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 68 tahun 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Adapun model pelaksanaan pendidikan melalui nilai luhur budaya di sekolah sudah melalui pengintegrasian dalam mata pelajaran, pengembangan diri baik di dalam kelas maupun luar kelas, dan budaya satuan pendidikan.

Pengintegrasian dalam mata pelajaran, yaitu pengembangan nilai-nilai luhur budaya diintegrasikan ke dalam materi pokok maupun sub materi pokok dari mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. Guru melihat keterkaitan substansi yang ada di dalam kurikulum dengan nilai-nilai luhur budaya. Hal ini ditunjukkan seperti mata pelajaran matematika menggunakan dakon untuk berhitung, IPA dengan uji karbohidrat pada makanan tradisional, olahraga dengan engklek dakon egrang, maupun PKK dengan mengajarkan suji, cekethong, *miru jarik*, laku dodok.

Pengembangan diri di dalam kelas maupun di luar kelas, yaitu pengembangan diri ini dilakukan dengan cara pembiasaan. Guru dengan sabar mengingatkan dan memberi arahan tentang sopan santun *unggah ungguh*, seperti memberikan teguran terhadap perilaku yang tidak baik, berbicara yang sopan dengan orang yang lebih tua, maupun cara meminta izin dengan benar.

Budaya satuan pendidikan, yaitu suasana kehidupan sekolah dimana sekolah mengupayakan nilai luhur budaya dapat melekat dalam setiap aktivitas di sekolah. Hal ini seperti program penggunaan Bahasa Jawa setiap hari Sabtu, salam ketika memasuki sekolah, ekstrakurikuler karawitan, ekstrakurikuler tari, dan peringatan hari nasional dengan memperlombakan kearifan lokal.

d. Keputusan

Kepala sekolah SD Negeri 1 Trirenggo berusaha semaksimal mungkin dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan guna mempermudah terlaksananya program. Hal ini dibuktikan dengan keputusan mengangkat guru-guru ekstra dan melakukan koordinasi dengan pihak luar. Keputusan tersebut merupakan segenap tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program. Para pemangku kebijakan harus seksama dalam mengambil keputusan karena akan memengaruhi ketercapaian tujuan yang dirumuskan. Mereka harus mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dari setiap program.

e. Dampak

Dampak yang ditunjukkan siswa SD Negeri 1 Trirenggo terhadap program yang dilaksanakan di sekolah mendapat respon yang beragam. Respon yang ditunjukkan siswa seperti menikmati dan merasa senang ketika diajari pembelajaran yang bukan pengetahuan, seperti karawitan. Siswa juga

mengerti bagaimana pamit izin ke kamar mandi dengan baik. Akan tetapi masih ada yang kurang memperhatikan ketika pembelajaran yang sifatnya pengetahuan di dalam kelas. Hal ini sekaligus menjawab teori Squire dan Taba (TIM Kreatif LKM UNJ, 2011: 158) yang menyebutkan bahwa apresiasi melibatkan tiga unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek emotif dan aspek evaluatif.

Tiga komponen tersebut memiliki relasi yang sangat erat dengan para siswa SD Negeri 1 Trirenggo. Siswa menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memahami dan menafsirkan atas sebuah nilai luhur budaya yang diajarkan guru di dalam kelas, seperti meminta izin ke kamar mandi menggunakan Bahasa Jawa. Sedangkan dalam aspek emotif, siswa menunjukkan respon menikmati dan ketertarikan terhadap nilai-nilai yang terkandung di pelajaran di kelas maupun luar kelas, seperti antusias melihat pemutaran video wayang maupun menggambar motif kawung. Sisi evaluatifnya ditunjukkan ketika siswa menerapkan dalam sebuah tindakan, seperti membedakan mana baik buruk, dan mampu mengaplikasikan bagaimana cara pamit yang benar.

. Implementasi kebijakan merupakan media yang menghubungkan perumusan kebijakan dengan hasil kebijakan yang diinginkan. Implementasi kebijakan sekolah budaya mengacu pada teori Charles O. Jones yang mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya,

implementasi adalah suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program, yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

a. Pengorganisasian

Dalam tahapan ini dilakukan pembentukan atau penataan sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar dapat berjalan lancar. SD Negeri 1 Trirenggo sudah melakukan pengorganisasian dengan cara briefing maupun rapat sekolah. Hal ini dilakukan guna mengingatkan kembali terhadap visi misi yang harus dicapai.

Koordinasi dengan guru juga dilakukan oleh Kepala Sekolah. Dengan menunjuk koordinator dalam pelaksanaan program, akan membantu lancarnya terlaksananya kegiatan. Dalam studi dokumen terdapat rincian program kegiatan dimana memuat waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sasaran program, frekuensi pelaksanaan, tempat dan kerja sama. Komponen yang detail tersebut dapat membantu melaksanakan program dengan lancar.

Guna menata sumber daya yang ada, SD Negeri 1 Trirenggo melakukan penguatan SDM melalui seminar maupun pelatihan guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Adapun seminar yang pernah diselenggarakan mengambil tema tentang mempertahankan budaya daerah yang adiluhung, pengembangan bahan ajar terkait

pembelajaran karakter berbasis kearifan lokal, filosofi busana Jawa, penerapan karakter melalui tembang, dan nilai kearifan yang terkandung dalam karawitan.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Dalam kaitannya pelaksanaan dalam kelas, SD Negeri 1 Trirenggo mengintegrasikan nilai budaya luhur ke dalam silabus yang kemudian dituangkan dalam RPP. Tahap ini sudah dilakukan oleh para guru dengan baik. Guru telah memahami unsur mana yang harus dimasukkan, dan mana yang pas diterapkan dalam pelajaran.

Penafsiran oleh para guru terhadap pengintegrasian ke dalam mata pelajaran sangat bagus. Hal ditunjukkan seperti mata pelajaran matematika menggunakan dakon untuk berhitung, IPA dengan uji karbohidrat pada makanan tradisional, pendidikan jasmani melakukan gerak motorik menggunakan egrang ataupun engklek, maupun PKK dengan mengajarkan pramuladi dengan cara laku dodok.

Tersampainya maksud dari kebijakan ke penangkapan guru tidak terlepas dari penjabaran program yang rinci dan tertuang dalam pedoman kegiatan sekolah budaya. Sesuai dengan Charles O. Jones dalam Putro (2013: 31) yang menjelaskan bahwa rumusan yang baik untuk implementasi yang efektif, biasanya rumusan kebijakan menekankan

pada kejelasan, ketepatan, konsistensi, skala prioritas, sumber daya yang memadai dan sebagainya.

c. Aplikasi

Berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pembelajaran, atau kegiatan sekolah lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. SD Negeri 1 Trirenggo melakukan pelaksanaan program cukup baik. Hal ini terlihat dari pendokumentasian foto-foto pelaksanaan program. Selain itu sekolah juga harus melaporkan ke Dikpora terhadap pelaksanaan program yang berlangsung setiap tahunnya. Dengan ini, dana bantuan dari Dinas akan turun sehingga sekolah menjadi lebih giat dan mengembangkan lagi ke tahap yang lebih luas.

Pelaksanaan program yang menonjol adalah pembiasaan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembiasaan yang dilakukan di sekolah memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan Daerah DIY nomor 5 tahun 2011 mengenai Penegelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Adapun nilai tersebut, meliputi kesopanan/kesantunan ditunjukkan dengan meminta izin ketika hendak pergi ke kamar mandi, dan tidak berbicara ketika makan; tanggung jawab ditunjukkan dengan cara meminjam dan mengembalikan sesuatu serta meminta maaf ketika salah; kedisiplinan ditunjukkan dengan cuci tangan serta berdoa sebelum makan; percaya diri ditunjukkan dengan maju pentas seni di depan Bupati

Bantul; serta kepedulian ditunjukkan oleh siswa yang tidak mendiskriminasi teman yang berkebutuhan khusus, mereka tetap bermain dan bercanda bersama.

Program sekolah disusun lebih ke bermain sambil belajar dengan mengenalkan budaya kearifan lokal, diantaranya Lomba menghias tumpeng dalam rangka ulang tahun sekolah, lomba keluwesan memakai pakaian adat jawa dalam rangka Hari Kartini, lomba membuat sudi, takir, samir dan cekethong, lomba dolanan anak seperti egrang, bakiak, dakon, gobak sodor, lomba *nembang jawa/panembromo*, lomba *miru jarik*, lomba *sesorah*, latihan menjadi pramuladi (*laden* dengan *laku dodok*), dan lomba alih aksara jawa.

Hal di atas menjawab pandangan Charles O. Jones dalam Putro (2013: 32) yang menggunakan gagasan permainan sebagai metafora utama yang mengarahkan perhatian serta merangsang pandangan di dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam bentuknya *games* atau permainan melibatkan peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak yang kalah. Penggunaan mereka sebagai metafora menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam mencapai tujuan tersebut.

Implementasi kebijakan Sekolah Budaya di SD Negeri 1 Tirirenggo dipengaruhi oleh beberapa komponen yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan Sekolah Budaya. Komponen yang

memengaruhi lancarnya pelaksanaan program karena guru-guru mudah untuk diarahkan. Hal ini guru mengikut perencanaan yang dirumuskan oleh Kepala Sekolah. Selain itu wali murid juga mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah dengan menyiapkan segala perangkat yang diperlukan anak untuk dibawa ke sekolah. Fasilitas sekolah seperti adanya gamelan, ruang seni budaya, ruang keterampilan juga membantu terlaksananya program sekolah. Hal ini menjawab faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana menurut Rohman (2004: 147). Faktor ini menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih. Akan tetapi Kepala sekolah masih mengeluhkan pendelegasian tugas masih terkendala SDM yang terbatas. Belum semuanya terlatih untuk menguasai nilai luhur dengan kearifan lokal. Di lain sisi, Kepala Sekolah juga kurang memonitoring kegiatan program yang tengah berjalan dikarenakan menyiapkan label sekolah lain yang ingin dicapai.

Alokasi waktu guru SD yang mengajar penuh di kelas, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengonsep RPP yang kaitannya dengan penanaman nilai luhur. Ada kelesuan yang ditunjukkan oleh

para guru, apabila Kepala Sekolah tidak memonitoringnya. Hal ini menjelaskan faktor yang terletak pada personel pelaksana menurut Rohman (2004: 147). Faktor ini sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan karena pelaksana yang menjadi actor kesuksesan suatu kebijakan. Hal ini menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan, serta kemampuan kerja sama dari pelaku pelaksana kebijakan tersebut. Termasuk latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi. Kesemuanya akan sangat memengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. selain hal tersebut, lingkungan yang ada di sekitar SD Negeri 1 Trirenggo belum menanamkan nilai budaya luhur. Keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil kurang memberi pembiasaan kepada anaknya. Hal ini menyebabkan kurang sinkron antara pembiasaan yang dilakukan di sekolah dengan di rumah.

Ekonomi keluarga juga memengaruhi terlaksananya program, seperti adanya piknik yang diadakan oleh SD Negeri 1 Trirenggo. Biaya yang telah disepakati bersama, terkadang ada wali murid yang tidak mendukung. Hal ini menghambat salah satu program yang dicanangkan oleh sekolah.

Kepala sekolah yang begitu visioner membuat SD Negeri 1 Trirenggo mendapat banyak label, seperti sekolah inklusif, sekolah berbasis budaya, sekolah ketahan

pangan dan sekolah sehat. Banyaknya label sekolah yang menempel pada SD Negeri 1 Trirenggo mengakibatkan banyaknya kegiatan sekolah sehingga kegiatan sekolah budaya kurang berjalan dengan baik, karena sekolah tengah fokus mempersiapkan kegiatan di luar label sekolah budaya. Hal ini menjawab teori faktor yang terletak pada rumusan kebijakan menurut Rohman (2004: 147). Faktor ini berkaitan dengan rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan menyangkut kejelasan kalimat, mudah dipahami, diinterpretasi, ketepatan tujuan dan sasaran, serta kemudahan dalam implementasinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan serta temuan penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Trirenggo maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Latar belakang SD Negeri 1 Trirenggo mengambil kebijakan sekolah berbasis budaya karena ingin melestarikan nilai budaya luhur dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan sekitar sekolah. Adapun proses perumusan kebijakan diawali inisiatif kepala sekolah untuk menanamkan nilai-nilai luhur dengan merumuskan tujuan yaitu, membangun kesadaran kebersamaan, budaya peduli dan penguatan nilai luhur. Perencanaan awalnya dilakukan oleh kepala

sekolah sendiri kemudian disosialisasikan kepada guru dan dalam penyusunan silabus dilakukan bersama-sama. Guru menyusun RPP disesuaikan dengan memasukkan unsur nilai budaya luhur. Program sekolah berupa pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, pembiasaan dan kegiatan peringatan hari nasional yang dihubungkan dengan nilai budaya luhur. Keputusan yang diambil kepala sekolah untuk mensukseskan program dengan mengangkat guru ekstra, dan melakukan koordinasi dengan pihak lain. Dampak yang ditunjukkan siswa yaitu mereka paham dan menikmati program, namun ada sedikit yang kurang antusias.

Implementasi kebijakan sekolah budaya di SD Negeri 1 Tiringgo berjalan cukup baik walaupun siswa perlu dibimbing berulang kali untuk bisa memahami nilai budaya luhur. Pengorganisasian sudah bagus dengan diadakannya seminar, pelatihan, dan *briefing*/rapat serta menunjuk koordinator program. Interpretasi dipahami oleh para guru melalui RPP dan mereka paham bahwa tidak semua nilai budaya luhur dimasukkan ke setiap mata pelajaran. Pengaplikasiannya berjalan dengan baik di dalam pengintegrasian dalam pembelajaran, kegiatan sekolah maupun pembiasaan. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan sekolah budaya yaitu, guru mudah diarahkan, dukungan wali murid dan pihak ketiga, fasilitas memadai, dan program yang terperinci. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan sekolah budaya

yaitu, SDM sekolah yang kurang terlatih, banyaknya kegiatan sekolah diluar label sekolah budaya, ekonomi wali murid menengah kebawah, dan lingkungan tempat tinggal siswa yang tidak mengajarkan nilai luhur.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Kepala sekolah disarankan untuk lebih giat memonitoring pelaksanaan program sekolah budaya.
2. Perencanaan program sekolah perlu melibatkan guru dan wali murid.
3. Kepala sekolah mendelegasikan koordinator sekolah budaya yang mumpuni untuk mengatur/memonitoring program agar berjalan dengan baik
4. Guru disarankan untuk lebih bersemangat dan berinisiatif dalam melaksanakan program sekolah budaya baik di kelas maupun di luar kelas.
5. Sering mengikuti pelatihan maupun seminar budaya guna menambah wawasan yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam pembelajaran.
6. Guru disarankan untuk terus mengingatkan dan mengajak wali murid ikut bersama-sama menanamkan nilai budaya luhur agar tidak terjadi kejomplangan antara di rumah dengan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Masyarakat Terdidik Berbasis Budaya. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

- Manan, I. (1989). *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi
- Moleong, L.J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemprov. (2011). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya*
- Pemprov. (2012). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*
- Putro, S.S. (2013). *Implementasi Kebijakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larista) di Kota Bandung*. Tesis: Univeritas Padjajaran
- Rohman, A. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Tim Kreatif LKM UNJ. (2011). *Restorasi Pendidikan Indonesia: Menuju*